

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG BPJS KESEHATAN DENGAN STATUS KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS JIPUT

Oleh:

Dana Profit Sampurno¹, Zita Atzmardina²

¹ Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta

² Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta

Korespondensi: dana.405170237@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Badan ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Mulai tanggal 1 Januari 2019 setiap Warga Negara Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kepesertaan dari BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini adalah ditingkatkannya pengetahuan sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan juga meningkat. Penelitian ini adalah studi deskriptif menggunakan metode crosssectional, subjek penelitian ini terdiri dari 113 responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang BPJS Kesehatan dan untuk analisis bivariatnya menggunakan metode Chi Square. Dalam penelitian ini diperoleh 58,4% responden merupakan peserta BPJS Kesehatan dan 55,8% responden memiliki tingkat pengetahuan cukup. Penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan.

Kata-kata kunci: BPJS Kesehatan, Pengetahuan, Kepesertaan

ABSTRACT

BPJS Kesehatan (Healthcare and Social Security Agency) is a public body that organizes the Health Insurance program. This agency aims to accomplish the implementation of the provision to meet the basic requirements of a decent life. Starting January 1st, 2019 every Indonesian citizen is mandatory to become a BPJS Kesehatan participant. The membership of BPJS Kesehatan is influenced by various factors, one of which is influenced by knowledge factors. The purpose of this study was to increase knowlegment of BPJS Kesehatan so the number of membership BPJS Kesehatan also increasing. This research is a descriptive study using crosssectional methods, the research subjects consisted of 113 respondents. Retrieval of data using a questionnaire comprised of questions about BPJS Kesehatan and using the Chi-Square method for bivariate analysis. In this study, 58.4% of respondents had BPJS Kesehatan membership and 55.8% of respondents had a moderate level of knowledge. This study reveals there is an association between the level of public knowledge about BPJS Kesehatan and BPJS Kesehatan membership status

Keywords: BPJS Kesehatan, Knowledge, Membership

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada tanggal 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia maupun warga negara asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.^{2,3}

Pada tanggal 1 Juli 2019 jumlah peserta BPJS tercatat sebanyak 222.463.022 jiwa, maka baru tercatat 83,2% penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.^{4,5} Jumlah ini masih dibawah angka target pemerintah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan studi untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai BPJS Kesehatan di Puskesmas Jiput yang saat ini memiliki jumlah peserta BPJS sebanyak 25.688 jiwa atau 87% dari 29.526 jiwa jumlah penduduknya.⁶

Sebelum penelitian ini dilakukan Sastradimulya (2015) dan Tanjung (2015) pernah melakukan penelitian serupa dan didapatkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan, sedangkan Pangestika (2017) dalam penelitiannya menyatakan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan.^{7,8,9}

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk ditingkatkannya pengetahuan sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan meningkat, dan dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan nilai $p = 0,012$.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Jiput pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menerapkan studi crosssectional dengan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui gambaran keikutsertaan program BPJS Kesehatan masyarakat Puskesmas Jiput. Subjek dari penelitian ini adalah pengunjung Puskesmas Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang pada periode Desember 2019 – Februari 2020. Jumlah responden yang dibutuhkan pada penelitian ini sebanyak 113 responden yang kemudian akan dilakukan pengukuran dengan cara mengisi kuesioner. Data yang telah didapat selanjutnya akan dilakukan analisis statistik dengan uji chi square yang dibantu dengan menggunakan software SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 113 responden penelitian ini didapati responden terbanyak adalah wanita dengan jumlah responden sebanyak 82 responden (72,6%). Rata-rata responden berusia 40 – 49 tahun, yaitu sebanyak 37 responden (32,7%). Tingkat pendidikan responden terbanyak yaitu tamatan SMP sebesar 46 responden (40,7%), dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga / tidak bekerja merupakan pekerjaan terbanyak, yaitu sebanyak 54 responden (47,8%). Penghasilan sebagian besar responden < Rp 1.500.000, yaitu sebanyak 85 responden (75,2%). Pada penelitian ini 66 responden (58,4%) merupakan peserta BPJS Kesehatan, dari jumlah tersebut terdapat 18 responden (27,3%) bukan merupakan Penerima Bantuan Iuran. Tingkat pengetahuan responden rata-rata dalam kategori cukup, yaitu sebanyak 63 responden (55,8%).

Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian

	Jumlah Responden (%)	Mean (Min ; Max)
Jenis Kelamin		-
Pria	31 (27,4%)	
Wanita	82 (72,6%)	
Usia		36,63 (17 ; 65)
> 50 Tahun	11 (9,7%)	
40 – 49 Tahun	37 (32,7%)	
30 – 39 Tahun	33 (29,2%)	
20 – 29 Tahun	24 (21,2%)	
< 20 Tahun	8 (7,2%)	
Pendidikan		SMP (SD ; S1)
SD	22 (19,5%)	
SMP	46 (40,7%)	
SMA	36 (31,9%)	
S1	9 (8,0%)	
Pekerjaan		Tidak Bekerja / Ibu Rumah Tangga
Mahasiswa / Pelajar	11 (9,7%)	
PNS	4 (3,5%)	
Wirausaha	4 (3,5)	
Buruh Tani	21 (18,6%)	
Tidak Bekerja	54 (47,8%)	
Ibu Rumah Tangga	17 (15%)	
Karyawan Wiraswasta	2 (1,8%)	
Pendapatan		< Rp 1.500.000 (< Rp 1.500.000 ; >Rp Mean (Min ; Max)
< Rp 1.500.000	85 (75,2%)	
1.500.000 – 3.000.000	18 (15,9%)	3.000.000)
> Rp 3.000.000	10 (8,8%)	
Status Kepesertaan		-
Peserta	66 (58,4%)	
Bukan Peserta	47 (41,6%)	
Jenis Kepesertaan		-
PBI	48 (72,7%)	
Bukan PBI	18 (27,3%)	
Pembayaran Bukan PBI		-
Rutin	13 (72,2%)	
Tidak Rutin	5 (27,8%)	
Tingkat pengetahuan		-
Kurang	39 (34,5%)	
Cukup	63 (55,8%)	
Baik	11 (9,7%)	

Dalam penelitian ini didapatkan rata rata responden yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan memiliki pengetahuan cukup, yaitu 50 responden (75,8%) dan responden yang paling sedikit tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan memiliki tingkat pengetahuan kurang, yaitu 23 responden (48,9%).

Setelah dilakukan uji chi-square diperoleh nilai $p < 0,05$ yaitu sebesar 0,012, sehingga diketahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan BPJS Kesehatan terhadap status kepesertaan BPJS Kesehatan dan kemudian didapatkan nilai prevalence ratio sebesar 1,818, hal tersebut dapat diartikan bahwa responden dengan tingkat pengetahuan rendah 1,818 kali lebih tinggi untuk tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Tabel 2. Hubungan Tingkat Pengetahuan terhadap Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pengetahuan	Status Keikutsertaan						Nilai P	PR	95% CI	
	Tidak Ikut		Ikut		Total				L	U
	n	%	N	%	N	%				
Kurang	23	48,9	16	24,2	39	100	0,012	1,818	1,342	2,768
Cukup	23	48,9	40	60,6	63	100				

Pengetahuan	Status Keikutsertaan						Nilai P	PR	95% CI	
	Tidak Ikut		Ikut		Total				L	U
	n	%	N	%	N	%				
Baik	1	2,2	10	15,2	11	100				
Total	47	41,6	66	58,4	113	100				

Dari 113 responden didapati bahwa responden wanita lebih banyak dibanding responden pria, dimana terdapat 82 responden (72,6%) wanita dan 31 responden (27,4%) merupakan pria. Tingginya kunjungan responden wanita di puskesmas Jiput menunjukkan kesadaran responden wanita terhadap program

BPJS Kesehatan, terutama untuk pelayanan Keluarga Berencana. Namun disisi lain jumlah wanita yang bukan peserta BPJS Kesehatan sebanyak 40 responden (35,4%), jumlah ini sesuai dengan penelitian Rahmiyati (2018) dari 72 responden ditemukan sebanyak

31,1% responden wanita belum mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Kesehatan, dikarenakan responden wanita cenderung bekerja sebagai ibu rumah tangga dan memilih untuk dirumah dibanding bekerja untuk membayar iuran perbulannya.¹⁰

Usia responden terbanyak pada rentang usia 40-49 tahun, didapatkan 37 responden (32,7%) merupakan responden penelitian ini dalam rentang usia tersebut. Dalam mengambil keputusan, usia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Seiring bertambahnya usia maka tingkat kekuatan berpikir seseorang juga akan lebih matang, Rahmiyati (2018) pada penelitiannya juga mengemukakan hal yang berupa, dimana 50,6% dewasa sudah menjadi peserta BPJS dan menyimpulkan bahwa seiring bertambahnya usia semakin besar juga kebutuhan untuk asuransi kesehatan, karena risiko penyakit yang semakin besar, sehingga hal ini mempengaruhi terhadap keikutsertaan BPJS Kesehatan.¹⁰

Niha (2018) dalam penelitiannya mendapatkan 92 dari 200 responden (46%) merupakan tamatan SD dan yang paling sedikit merupakan lulusan S1 yaitu sebanyak 5 responden (2,5%), dari penelitian tersebut tingkat pendidikan memiliki hubungan terhadap status kepesertaan program JKN-KIS masyarakat kecamatan Singkil¹¹, sedangkan dalam penelitian ini rata-rata responden adalah lulusan SMP, didapatkan 46 responden (40,7%) merupakan tamatan SMP, sedangkan tamatan S1 merupakan responden yang paling sedikit pada penelitian ini, yaitu sebanyak 9 responden (8%).

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang perlu melakukan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk pelayanan kesehatan yang diinginkan. Menurut Niha (2018) pekerjaan memiliki hubungan dengan status kepesertaan program JKN-KIS.¹¹ Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini bahwa pekerjaan paling

banyak dari responden adalah ibu rumah tangga, yaitu sejumlah 54 responden (47,8%) dan dari jumlah tersebut terdapat 25 ibu rumah tangga (46,3%) yang tergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Seorang ibu rumah tangga hanya mengurus perihal dalam rumah tangga sehingga sebanyak 29 ibu rumah tangga lainnya (52,7%) pada penelitian ini belum menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Pendapatan sebagian besar responden < Rp 1.500.000 perbulan, yaitu sebanyak 85 responden (75,2%), dan hanya terdapat 10 responden (8,8%) yang memiliki penghasilan > Rp 3.000.000 perbulannya. Hal ini berpengaruh terhadap keikutsertaan BPJS Kesehatan, dimana bagi masyarakat fakir miskin dan golongan tidak mampu yang termasuk pada UU SJSN akan didaftarkan sebagai anggota Penerima Bantuan Iuran. Penelitian Ernawati (2019) sejalan dengan penelitian ini yang mendapati 43 responden dari 72 responden (59,7%) memiliki pendapatan dibawah UMK Kabupaten Bengkalis tahun 2018, dari penelitian tersebut dinyatakan terdapat hubungan yang bermakna antara kepesertaan JKN Mandiri dengan pendapatan.¹² Pada prakteknya sebagian besar kepala keluarga di Kecamatan Jiput berprofesi sebagai buruh tani, sehingga tingkat kepesertaan BPJS di Kecamatan Jiput didominasi oleh peserta Penerima Bantuan Iuran.

Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang yang merupakan hasil penginderaan, baik dari mata, hidung, telinga, ataupun lainnya. Pengetahuan merupakan faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Responden dalam penelitian ini sebagian besar cukup memahami informasi mengenai BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 63 responden (55,8%), hal ini tidak sesuai dengan penelitian Sastradimulya (2014) dimana pada penelitiannya di puskesmas Majalaya, kabupaten Bandung yang didapatkan 37,5% atau rata-rata dari responden berpengetahuan baik. Angka tersebut diakibatkan oleh lokasi Majalaya yang tidak jauh jaraknya dari Bandung, sehingga informasi lebih mudah dalam penyebarannya,⁷ sedangkan kecamatan Jiput merupakan wilayah pegunungan dan berbukit-bukit sehingga informasi akan lebih lambat dalam penyebarannya.

Hermawati (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kondisi seseorang yang mengerti atau mengetahui dan memahami suatu produk asuransi

membangun kesadaran akan berasuransi, dalam penilitan ini produk yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan.⁸

Berdasarkan hasil penelitian responden dengan pengetahuan kurang yang tidak tergabung dalam program BPJS kesehatan sebanyak 23 responden (48,9%) dan yang sudah tergabung sebanya 16 responden (24,2%), sementara responden dengan pengetahuan cukup yang belum tergabung dalam program BPJS Kesehatan sebanyak 24 responden (51,1%) dan yang sudah tegabung sebanyak 50 responden (75,8%).

Berdasarkan hasil uji statistik *chi-square* didapatkan nilai $p < 0,05$ yaitu sebesar 0,012, yang berarti terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap BPJS Kesehatan dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan pada masyarakat Puskesmas Jiput. Hal ini sesuai dengan penelitian Sastradimulya (2015), dalam penelitiannya mengenai hubungan antara pengetahuan tentang JKN pasien dengan kepesertaan BPJS, yang menganalisis hubungan tersebut dengan metode analitik *cross sectional* menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berhubungan dengan keikutsertaan BPJS Kesehatan, dengan nilai $p = 0,001$.⁷ Tanjung (2015) pada penelitian *cross sectional*nya mengenai hubungan pengetahuan JKN dengan sikap kepesertaan JKN Mandiri di puskesmas Mergangsan juga menyimpulkan terdapat hubungan tentang pengetahuan JKN dengan sikap kepesertaan JKN mandiri dengan nilai $p = 0,004$.⁸ Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestika (2017) mengenai faktor yang berhubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan di kelurahan Poncol, dalam penelitiannya yang menggunakan rancangan penelitian *cross sectional* diperoleh nilai $p = 0,053 \geq 0,05$ yang berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.⁹

Prevalence ratio didapatkan sebesar 1,818 yang berarti responden dengan tingkat pengetauan kurang 1,818 kali lebih tinggi beresiko untuk tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup.

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan mengisi kuesioner sehingga bergantung pada kejujuran, ingatan subjek, dan pemahaman subjek terhadap setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner, keterbatasan lainnya adalah waktu pengisian kuesioner yang dilakukan ketika mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hal ini membuat beberapa responden mengisi kuesioner dengan terburu buru ketika gilirannya telah tiba, yang kemudian mempengaruhi pada ketelitian responden dalam menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada, sehingga kesalahan informasi pada penelitian ini tidak dapat dihindari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini didapatkan responden rata rata memiliki tingkat pengetahuan cukup, yaitu sebanyak 63 responden (55,8%), kemudian didapatkan 66 responden (58,4%) merupakan peserta BPJS Kesehatan dan 47 lainnya (41,6%) bukan merupakan peserta BPJS Kesehatan. Selain itu ditemukan juga hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan status kepesertaan BPJS kesehatan dengan nilai $p = 0,012$ dan secara epidemiologi 1,818 kali lebih tinggi berpengaruh pada status kepesertaan BPJS pada responden dengan tingkat pengetahuan yang kurang. Sebaiknya program BPJS yang sudah ada dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, termasuk dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan yang ada, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat program BPJS Kesehatan dan dapat terjadi peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2004.
2. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 2018.
3. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja ,dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 2013.
4. Notoatmodjo ProfDrS. Metodologi Penelitian Kesehatan. PT Rineka Cipta. 2010.
5. Wijayanto WP. Hubungan Pengetahuan dan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Terhadap Aksesibilitas BPJS. Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan 2 (2) 2017, 131 – 140. 2017.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Jiput Dalam Angka 2019. 2019

7. Sastradimulya F, Nurhayati E, Susanti Y. Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien Tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan Status Kepesertaan BPJS. Bagian farmakologi Universitas Islam Bandung.
8. Isnaeni Y, Agustina Tanjung S. Hubungan Pengetahuan tentang JKN dengan Sikap Kepesertaan JKN Mandiri di Puskesmas Mergangsan Yogyakarta Tahun 2015. PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK JENJANG DIV SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH YOGYAKARTA. 2015.
9. Pangestika VF, Jati SP, Sriaatmi A. Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Sektor Informal dalam BPJS Kesehatan Mandiri Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Jurnal Kesehatan Masyarakat.2017.